

**STRATEGI PEMENANGAN PARTAI NASDEM PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Skripsi

Oleh:

EL HUSAIN AULA FADHLAN

NPM 2056021006



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2026

**STRATEGI PEMENANGAN PARTAI NASDEM PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

EL HUSAIN AULA FADHLAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

STRATEGI PEMENANGAN PARTAI NASDEM PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK

Oleh

EL HUSAIN AULA FADHLAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya perolehan kursi Partai NasDem pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara di tengah kecenderungan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Fenomena tersebut menunjukkan adanya strategi politik yang efektif dalam memenangkan kontestasi elektoral di tingkat lokal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kemenangan Partai NasDem pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori strategi politik yang dikemukakan oleh Peter Schroder, yang membagi strategi politik ke dalam dua kategori, yaitu strategi defensif, dan strategi ofensif. Teori ini digunakan untuk menganalisis pola dan pendekatan yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam memperoleh dukungan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai NasDem menerapkan strategi defensif melalui pemeliharaan basis pemilih dan penguatan loyalitas konstituen. Strategi ofensif dilakukan dengan memperluas dukungan melalui kampanye intensif dan pendekatan langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media serta komunikasi politik yang terarah, dan dengan mengoptimalkan figur calon legislatif yang memiliki kedekatan sosial serta memperkuat struktur organisasi partai. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh kampanye tatap muka, pendidikan kader melalui Akademi Bela Negara, konsolidasi internal, serta pemetaan wilayah politik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Partai NasDem merupakan hasil dari penerapan strategi politik yang sistematis, terintegrasi, dan adaptif terhadap kondisi sosial politik lokal, serta didukung oleh kekuatan organisasi dan kapasitas figur kandidat.

Kata kunci: strategi politik, partai politik, Pemilu 2024, Partai NasDem, Lampung Utara.

***WINNING STRATEGY OF THE NASDEM PARTY IN THE 2024
LEGISLATIVE ELECTION IN NORTH LAMPUNG REGENCY***

ABSTRACT

By

EL HUSAIN AULA FADHLAN

This study is motivated by the increasing number of seats obtained by the NasDem Party in the 2024 Legislative Election in North Lampung Regency, amid the declining level of public trust in political parties. This phenomenon indicates the existence of effective political strategies in winning electoral contests at the local level. Based on this background, the research problem is formulated as follows: how is the winning strategy of the NasDem Party in the 2024 Legislative Election in North Lampung Regency. This study employs a qualitative approach with a descriptive type. This study applies the political strategy theory proposed by Peter Schroder, which categorizes political strategies into two types: defensive strategies and offensive strategies. This theory is used to analyze the patterns and approaches implemented by the NasDem Party in gaining political support. The results show that the NasDem Party applied defensive strategies by maintaining its voter base and strengthening constituent loyalty. Offensive strategies were implemented by expanding support through intensive campaigns and direct engagement with the community, utilizing media and targeted political communication, as well as optimizing legislative candidates who have strong social proximity while strengthening the party's organizational structure. In addition, the success was supported by face-to-face campaign approaches, cadre development through the Bela Negara Academy, internal consolidation, and political mapping. The conclusion of this study shows that the success of the NasDem Party is the result of the implementation of systematic, integrated, and adaptive political strategies in response to local socio-political conditions, supported by strong organizational capacity and the capability of candidate figures.

Keywords: political strategy, political party, 2024 Election, NasDem Party, North Lampung.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : STRATEGI PEMENANGAN PARTAI NASDEM
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Nama Mahasiswa : El Husain Aula Fadhlan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056021006

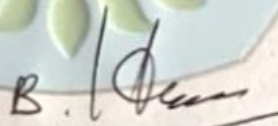
Program Studi : S-1 Ilmu Pemerintahan

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

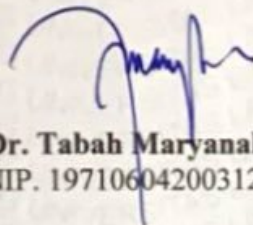


1. Komisi Pembimbing



Budi Harjo, S.Sos., M.IP
NIP. 196801121998021001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



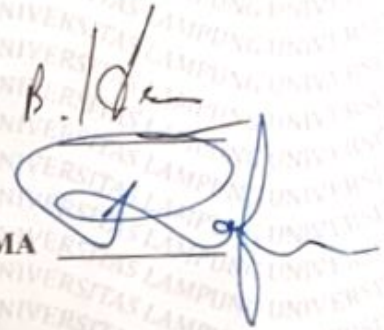
Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

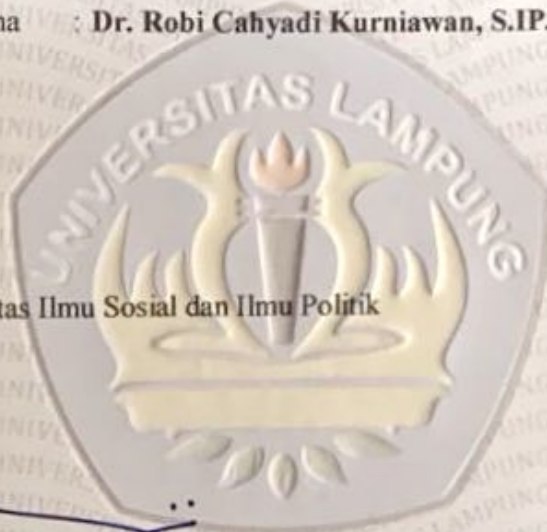
1. Tim Penguji

Ketua : Budi Harjo, S.Sos., M.IP

Penguji Utama : Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., MA



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



El Husain Aula Fadhlán
NPM 2056021006

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama El Husain Aula Fadhlán dilahirkan di Kotabumi, 18 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari Bapak Imam Syuhada dan Ibu Feronika Busri, S.Pd., M.M. Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2008-2014. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 07 Kotabumi pada tahun 2014-2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kotabumi pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2020.

Selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila penulis mengikuti berbagai kegiatan baik akademik maupun non akademik dalam menunjang kapasitas diri penulis. Tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan dan bergabung pada Himpunan Mahasiswa Islam Memasuki tahun 2022, penulis berada dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Biro III Kajian dan Keilmuan dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Demikianlah segelintir aktivitas sejak rentang tahun 2020 hingga 2024. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian diri, sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Harapan penulis dalam pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabd.

MOTTO HIDUP

”Banyak Orang Juara di Dalam Kelas dan Sebagian Lainnya Juara di Dalam
Hidup”

(El Husain Aula Fadhlan)

“Yakin Usaha Sampai”

(El Husain Aula Fadhlan)

PERSEMBAHAN



Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada :

Kedua orang tuaku Ayah dan Bunda tercinta

Imam Syuhada dan Feronika Busri, S.Pd., M.M

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“STRATEGI PEMENANGAN PARTAI NASDEM PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA”** sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggan bagi penulis melalui san wacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

4. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP dan Bapak Bendi Juantara, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi dari awal sampai terselesaikan nya skripsi ini, yang telah memberikan waktu luang dan memberikan saran serta masukannya demi keberhasilan penyelesaian skripsi dengan baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas bimbingannya baik dalam hal akademik maupun non akademik, terimakasih atas banyaknya pengalaman yang telah bapak berikan. Semoga bapak sehat selalu dan setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;
9. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Dosen Penguji penulis yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT melancarkan segala urusan bapak dan selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT;
10. Bapak Prof. Dr. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, semoga bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.;
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan, semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT;

12. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
13. Kedua orang tua ku tercinta, malaikat tak bersayap, Bapak Imam Syuhada dan Ibu Feronika Busri, S.Pd., M.M. atas segala doa yang tercurah limpahkan, kasih sayang tiada tara. Segala dukungan dalam berbagai bentuk, yang tidak akan mampu penulis balas atas banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis. Ibu dan buyah, terimakasih atas kesabarannya dalam merawatku hingga tumbuh se dewasa ini. Banyak tantangan yang akan terjadi kedepan tapi aku yakin dengan doa dan dukungan dari ibu dan buyah semua dinamika akan bisa kulalui.
14. Terimakasih untuk oma yang selalu mengingatkan bahwa penulis adalah anak tertua dan cucu tertua yg artinya memiliki tanggung jawab untuk adik-adiknya. Terimakasih dukungan dan doa dari oma yang selalu menguatkan untuk proses kehidupan.
15. Teruntuk adik-adik yang ajo sayangi Abi, Ratu, dan Arifa terimakasih atas segala doa dan support yang telah diberikan selama melakukan proses penyusunan skripsi.
16. Terima kasih kepada Saskia Putri, S.I.Kom yang selalu hadir dengan doa, dukungan, dan kesabaran di setiap proses yang tidak mudah ini. Kehadiranmu menjadi kekuatan tersendiri yang membuat untuk tetap bertahan dan terus melangkah hingga akhirnya sampai di titik ini.
17. Terima kasih kepada Salute Brother yang selalu menemani, menguatkan, dan menjadi tempat berbagi di tengah perjalanan skripsi yang penuh tantangan. Bersama kalian, setiap proses terasa lebih ringan dan bermakna.
18. Teruntuk keluarga besar HMI Komisariat Sosial Politik Unila terimakasih telah mengajarkan kepada saya telah banyak mengajarkan saya tentang kehidupan dan pembelajaran-pembelajaran yang tidak saya dapatkan dikampus.
19. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru

hingga menjadi mahasiswa akhir sampai sekarang. Semoga kita dipertemukan lagi dilain kesempatan dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga.

20. Semua pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
21. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih sudah mau bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah berjuang dan merayakan dirimu sendiri sampai detik ini, walaupun sering merasa putus asa namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha. Terima kasih karena telah memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Terimakasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap muka maupun yang hanya berjumpa pikiran. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian khususnya di bidang pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Mei 2026
Peneliti

El Husain Aula Fadhlán
NPM. 2056021006

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
ABSTRACT	4
HALAMAN PENGESAHAN	5
PERNYATAAN	7
RIWAYAT HIDUP	ii
MOTTO HIDUP	iii
PERSEMBAHAN	iv
SANWACANA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Strategi.....	10
2.1.1 Definisi Strategi.....	10
2.1.2 Strategi Pemenangan.....	12
2.2 Tinjauan Partai Politik	18
2.2.1 Definisi Partai Politik.....	18
2.2.2 Fungsi Partai Politik.....	21
2.2.3 Peran Partai Politik	24

2.3	Tinjauan Pemilihan Umum	31
2.3.1	Pengertian Pemilihan Umum.....	31
2.3.2	Fungsi Pemilihan Umum.....	34
2.3.3	Asas Pemilihan Umum.....	35
2.4	Kerangka Pikir	40
III.	METODE PENELITIAN	41
3.1	Tipe Penelitian	41
3.2	Fokus Penelitian.....	42
3.3	Penentuan Informan	42
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data	44
3.6	Teknik Pengolahan Data	46
3.7	Teknik Analisis Data.....	47
3.8	Teknik Validasi/Keabsahan Data	49
IV.	GAMBARAN UMUM	51
4.1	Gambaran Umum Partai NasDem	51
4.1.1	Visi dan Misi Partai Nasdem.....	53
4.1.2	Anggaran Dasar Partai Nasdem.....	55
4.2	Gambaran Umum Lampung Utara	58
4.2.1	Kondisi Geografis	58
4.2.2	Topografi.....	59
4.2.3	Iklm	59
4.2.4	Perekonomian dan Mata Pencaharian	60
4.2.5	Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	60
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
5.1	Strategi Defensif	63
5.2	Strategi Ofensif.....	71
5.2.1	Strategi Pencitraan	77
5.2.2	Strategi Ketokohan dan Kelembagaan.....	86

VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
6.1 Kesimpulan.....	96
6.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2004 – 2024	3
Tabel 2. Perolehan Daerah Pemilihan (Dapil).....	3
Tabel 3. Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2024	4
Tabel 4. Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Lampung Utara 2024.....	4
Tabel 5. Triangulasi Informan	43
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Lampung Utara tahun 2024.....	68
Tabel 7. Rekapitulasi Penetapan Hasil Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Lampung Utara tahun 2024.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	40
Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Rakerda Partai NasDem.....	67
Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Masyarakat Jalan Sehat	82
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Masyarakat Santunan Anak Yatim.....	84
Gambar 5. Dokumentasi Pemasangan Bendera Partai Nasdem dalam rangka pengenalan tokoh.....	90
Gambar 6. Dokumentasi Pemasangan <i>Banner</i> dalam rangka pengenalan tokoh .	93

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Demokrasi memiliki arti yaitu pemerintahan rakyat. Jadi demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Demokrasi melalui bentuk pemerintahan dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat secara aktif dalam mengambil keputusan yang diberi wewenang (Triwahyuningsih, 2019). Pemilu merupakan sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu adalah salah satu wujud nyata proses demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai realisasi kehidupan tata negara yang demokratis (Wibowo dkk., 2022).

Pemilu merupakan jalan untuk menciptakan Indonesia menjadi negara yang berdikari, oleh karena itu pemimpin yang akan ditunjuk harus dengan seleksi yang begitu ketat agar memperoleh pemimpin yang memiliki kompetensi yang bagus dan dapat memajukan negara dan masyarakat Indonesia. Sistem pemilu merupakan gambaran perwujudan dari demokrasi yang sebagai wujud dari sila keempat dalam pancasila. Belum terlaksananya demokrasi sebagai wujud sila keempat pancasila dalam pemilu di indonesia dapat dilihat dari beberapa contoh kasus pemilu sering terjadi berbagai macam konflik. Penyebab dari konflik itu pun beragam, dimulai dari partai politik yang belum mencerminkan demokrasi, konflik internal dalam partai, calon dari partai politik yang tidak mau menerima kekalahan dan pendukung dari parpol tidak realistis dalam menghadapi kekalahan calon yang didukungnya (Mulyono & Fatoni, 2019).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-

wakilnya dalam lembaga legislatif. Dalam konteks ini, partai politik memainkan peran sentral sebagai kendaraan politik yang mengusung calon legislatif untuk merepresentasikan aspirasi masyarakat. Keberhasilan partai politik dalam meraih suara signifikan pada Pemilu tidak hanya mencerminkan dukungan elektoral, tetapi juga menunjukkan efektivitas strategi politik yang diterapkan.

Strategi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilu. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu akhir-akhir ini juga harus bekerja ekstra, karena melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun dari tahun ke tahun. pada pemilu pasca Reformasi tahun 1999 jumlah Golput (Golongan Putih) mencapai angka 7,3%, pada Pemilu 2004 meningkat 15,9%, Pemilu 2009 juga meningkat hingga mencapai angka 29,1%, Pemilu 2014 dan 2019 jumlah golput berada di sekitar 25-30%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik.

Secara konseptual, banyak kajian yang telah mendefinisikan tentang partai politik. Partai politik dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang terikat kuat oleh keyakinan yang sama, kepentingan yang sama, dan komitmen yang sama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, menawarkan sebuah kebijakan alternatif untuk pemerintahan atau menduduki jabatan publik tertentu dengan catatan cara meraih kekuasaan tersebut melalui jalur sah, legal, dan konstitusional.

Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, muncul Partai Nasional Demokrat (selanjutnya ditulis Nasdem) yang baru deklarasi pada tahun 25-26 Januari 2013 siap mewujudkan perubahan melalui visinya yaitu Restorasi Indonesia, dan mengikuti pemilu pertamanya pada tahun 2014, Nasdem langsung mendapatkan Nomor Urut 1 pada keikutsertaannya di Pemilu 2014, dan langsung menunjukkan hasil yang positif serta prestasi yang lebih membanggakan pada Pemilu 2019.

Jika melihat persentase perolehan suara pada Pemilu 2014 sampai 2024, Nasdem selaku partai yang baru dua kali mengikuti pemilu yaitu tahun 2014 dan 2019 memiliki perbandingan perolehan suara yang sangat jauh berbeda. Berikut adalah ringkasan hasil perolehan suara Pemilu 2004 sampai 2024:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2004 – 2024

No	Tahun	Partai Pemenang (%)	Rangking 4 Besar
1	2004	Golkar 21,6%	PDIP 18,5%, PPP 10,5%, PPB 8,15%, Demokrat 7,45%
2	2009	-	-
3	2014	PDIP 18,95%	Golkar 14,75%, Gerindra 11,81%, Demokrat 10,18%, PPP 9,04%
4	2019	PDIP 19,33%	Gerindra 12,57%, Golkar 12,31%, PKB 9,69%, NasDem 9,05%,
5	2024	PDIP 16,72%	Golkas 15,29%, Gerindra 13,22%, NasDem 9,66%,

Sumber : Data diolah Peneliti

Partai Nasional Demokrat (NasDem), sebagai salah satu partai politik nasional di Indonesia, telah menunjukkan kinerja yang menonjol dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil resmi, Partai NasDem berhasil memperoleh total 7 kursi dari 45 kursi yang tersedia di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara. Perolehan ini tersebar di beberapa Daerah Pemilihan (Dapil), antara lain:

Tabel 2. Perolehan Daerah Pemilihan (Dapil)

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Suara
1.	I	2 Kursi	Cerly Yusrizal : 6.588 suara Hj. Dewi Murni : 2.941 suara
2.	II	2 Kursi	Hj. Mega Rani : 2.888 suara Tesa Anggarani : 3.553 suara
3.	III	1 Kursi	Heri Yanto : 4.451 suara
4.	V	1 Kursi	Ali Darmawan : 3.319 suara
5.	VII	1 Kursi	Genius Akbar : 3.001 suara

Sumber : Data diolah Peneliti

Keberhasilan ini menempatkan Partai NasDem sebagai salah satu kekuatan politik signifikan di Kabupaten Lampung Utara, menunjukkan peningkatan dibandingkan perolehan pada pemilu sebelumnya. Pencapaian ini tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh partai dalam menghadapi dinamika politik lokal dan nasional.

Tabel 3. Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2024

Tahun	Total Kursi	Gerindra	PDI P	Golkar	Nasdem	PKB	Demokrat
2024	600 Kursi	91	98	83	71	78	61

Sumber : Data diolah Peneliti

Tabel 4. Hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Lampung Utara 2024

Tahun	DPT	Partisipasi (%)	Kursi Legislatif
2024	479.467	78,55%	Gerindra 8, NasDem 7, PKB 5, Demokrat 5, PKS 5, PDIP 5, PAN 5, Golkar 5

Sumber : Data diolah Peneliti

Salah satu strategi utama yang diimplementasikan oleh Partai NasDem adalah pendekatan kampanye tatap muka. Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menekankan bahwa pertemuan langsung dengan masyarakat lebih efektif dalam menarik simpati pemilih. Caleg Partai NasDem intens melakukan kampanye tatap muka, dengan minimal 12 titik per hari, untuk menyampaikan program dan visi misi partai serta memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait proses pemilu.

Selain itu, Partai NasDem juga memanfaatkan pendidikan kader melalui Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, sebuah institusi pelatihan kader yang memberikan pendidikan politik dan kepemimpinan. ABN NasDem merupakan satu-satunya akademi partai politik di Indonesia yang memiliki program pelatihan formal, yang bertujuan untuk mencetak kader-kader berkualitas dan berintegritas.

Strategi lain yang diterapkan adalah konsolidasi internal dan pemetaan wilayah. DPW Partai NasDem Provinsi Sumatera Barat, misalnya, melakukan konsolidasi internal, bedah Dapil, dan pembekalan Caleg sebagai bagian dari strategi kemenangan. Upaya ini mencakup program sayap partai, evaluasi kinerja caleg, peranan anggota partai, dan kegiatan sosial. Meskipun contoh ini berasal dari Sumatera Barat, pendekatan serupa dapat diadopsi oleh DPW Partai NasDem di Lampung Utara.

Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah pemilih yang cukup besar di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk terpadat nomor 5 (lima) di Provinsi Lampung sehingga menjadikannya sebagai wilayah yang memiliki nilai strategis dalam kontestasi politik, khususnya pada pemilihan legislatif. Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang memiliki warisan budaya yang sangat kental, dalam konteks ini pemilih sering kali mengedepankan kedekatan dengan tokoh lokal atau figur yang dianggap sebagai local strongman sehingga perlu adanya strategi kemenangan yang diterapkan mempertimbangkan cara untuk beradaptasi dengan kekuatan ini dan dapat memanfaatkan hubungan sosial yang sudah terjalin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, terjadi kecenderungan peningkatan perolehan suara maupun konsolidasi dukungan politik terhadap Partai NasDem dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan adanya keberhasilan strategi yang diterapkan oleh partai, baik dalam aspek komunikasi politik, mobilisasi massa, hingga pemanfaatan struktur kelembagaan partai di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kemenangan Partai NasDem pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara, dengan fokus pada pendekatan kampanye, pendidikan kader, konsolidasi internal, dan pemilihan calon legislatif yang memiliki elektabilitas tinggi.

Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Cara kita mengamati

kegiatan politik itu akan mempengaruhi apa yang kita lihat. Pendekatan (*approach*) sebagai kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan (Dyke, 1960:114). Dengan kata lain, istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan.

Sebagai bahan referensi penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kaitannya dengan penelitian :

Pertama, Lindawati (2013) menganalisa tentang strategi partai politik dalam menghadapi Pemilu 2014 di tengah kondisi di mana kepercayaan masyarakat Indonesia menurun terhadap partai politik. Temuan Lindawati menunjukkan, bahwa partai politik harus mengorganisir kegiatan kampanye untuk memenangkan pemilu. Kampanye politik harus dilakukan terus-menerus, tidak hanya dalam masa pemilu agar masyarakat akrab dengan partai politik dan mudah mendapatkan suara dan citra politik dari masyarakat. Selain itu, partai politik juga harus melakukan strategi push marketing (mobilisasi dan berburu pendukung) dan pull marketing (membangun reputasi politik).⁹ Senada dengan itu, Nurjaman (2014) mencoba ingin mengetahui cara partai-partai politik baru era Reformasi meraih suara dan bersaing dengan partai-partai mapan yang lebih dulu berpartisipasi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Selain mengetahui cara partai baru mendapatkan suara, Nurjaman juga menganalisa tentang cara partai lama atau partai yang sudah mapan dalam mempertahankan basis massanya agar tidak pindah ke partai baru.

Kedua, Mahmud (2009) meneliti tentang strategi perbandingan kampanye yang dilakukan oleh PKPI dan PKS di mana kedua partai ini mengalami lonjakan suara yang signifikan pada Pemilu 2004 dibandingkan dengan Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, suara PKPI meningkat hingga 784,8%, sementara PKS juga mengalami peningkatan sebesar 555,5%.¹¹ Masih dalam konteks yang sama, Yutanti (2006) menelaah tentang pentingnya strategi kampanye yang dilakukan oleh lembaga kehumasan partai politik pada Pemilu 2004 khususnya di Kota Malang. Menurut Yutanti, dengan

adanya humas, partai politik mampu menjembatani komunikasi politik secara efektif antara partai politik dengan pemilih meskipun penyebutan nama lembaga kehumasan di enam partai politik di Kota Malang berbeda-beda

Ketiga, Iranda Putri (2018) , dengan judul “Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” , hasil penelitian menggambarkan bahwa Strategi defensif yang diterapkan PDI-Perjuangan dengan pemeliharaan yang baik, memerintahkan penugasan partai turun ke lapangan dengan program-program partai, lalu memintim dengan cara reses anggota dapil. Dalam mempertahankan mayoritas pasar PDI-Perjuangan juga melakukan dimedia massa dengan cara mengcounter isu-isu miring terhadap PDI- Perjuangan. Strategi ofensif PDI-Perjuangan dengan trik menjual image yang baik di masyarakat yang daerahnya tidak memiliki basis PDI-Perjuangan dengan mempromosikan tentang PDI-Perjuangan. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan humanis yang turun kebawah menyapa masyarakat.

Keempat, Achitia Lindi Saputri (2023), dengan judul “Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelora Indonesia Provinsi Lampung Dalam Pemenangan Pemilihan Umum 2024” hasil penelitian menggambarkan Mengenal khalayak sebagai langkah Partai Gelora yang berperan sebagai komunikator dalam membangun komunikasi politik yang efektif. kunjungan dan sosialisasi yang dilakukan Partai Gelora Provinsi Lampung dalam mengenal khalayak dinilai belum maksimal. Karena dari 13 kabupaten dan 2 kota yang ada di Lampung hanya mengunjungi 3 daerah yang ada di Lampung. Daerah yang Partai kunjungi dan di unggah dalam akun milik Partai Gelora Provinsi Lampung adalah Desa Totoharjo kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2023, Kelurahan Negri Olok Gading Kota Bandar Lampung yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian Kelurahan Sukajawa Kota Bandar Lampung yang diadakan pada tanggal 21 Maret 2023.

Kelima, Aldy Nadiantara (2022), dengan judul “Strategi Partai Gelora Untuk Lolos dan Bersaing Dengan Partai Lain Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi di Dewan Perwakilan Daerah Partai Gelora Kota Bandar Lampung)” hasil penelitian menggambarkan bahwa pada dasarnya Strategi Politik merupakan suatu hal yang dibutuhkan untuk keberlangsung partai politik. Partai gelora memiliki Strategi yang dapat meyakinkan masyarakat Kota Bandar Lampung. Partai Gelora bekerja keras untuk memperoleh basis massa yang banyak dan mencapai untuk lolos dan bersaing dengan partai lain terutama cara Partai Gelora menyiasati anggapan negatif dari masyarakat mengenai pembentukan dari partai politik baru. Masyarakat memang sudah merasa bosan dengan adanya partai politik baru dikarenakan partai politik hanya mementingkan kepentingannya tanpa memedulikan aspirasi dari masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Kemenangan Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Lampung Utara” ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Peneliti uraikan ke dalam bentuk pertanyaan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Strategi Kemenangan Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial dan politik, khususnya dalam bidang Politik yang berkaitan dengan Strategi Kemenangan Partai Nasdem pada Pemilihan Legislatif DPRD 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan refleksi maupun suatu peringatan bagi partai politik dalam memenangkan Pemilihan Umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “stratos” yang artinya tentara dan “agein” yang berarti memimpin. Maka strategi dapat diartikan sebagai memimpin tentara. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Ada berbagai macam pengertian tentang strategi yang dikemukakan oleh para ahli dalam karya mereka masing-masing.

Menurut Marrus dalam Umar (2002:31), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut Rangkuti (2009:3) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan Firmanzah (2008:259) mengatakan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. Jadi strategi disini merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (baik ideologi, politik, sosial, budaya ataupun hukum) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mintzberg (2007:306) menyebutkan jika konsep strategi itu mencakup beberapa arti yang saling terkait. Dimana strategi adalah :

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas aktivitasnya
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Prahalad (Nimmo, 2005:121) pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Strategi lebih mengarah pada tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Didalam strategi terdapat susunan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sesuai penjelasan tentang pengertian strategi dari beberapa ahli, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara yang dirancang dan dirumuskan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi politik digunakan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik untuk menarik simpati atau dukungan khalayak luas untuk mendukung suatu kebijakan yang telah ditentukan, sesuai dengan tujuan partai politik tersebut. Hal tersebut sesuai dengan definisi strategi yang dikemukakan oleh Prahalad (Nimmo, 2005:121) maka dalam penelitian ini secara sederhana yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun tahun 2024.

Sejak abad modern, penggunaan istilah strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni panglima memimpin dalam peperangan, akan tetapi sudah digunakan secara luas hampir dalam semua bidang ilmu. Dalam arti luas, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi juga diartikan sebagai pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

2.1.2 Strategi Pemenangan

Menurut Sofjan Assauri (2013:2-3), strategi adalah penetapan tujuan dan sasaran dasar suatu organisasi yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, istilah “strategi” sering dirumuskan sebagai rangkaian tindakan atau cara yang dilakukan oleh suatu organisasi, dalam rangka upaya organisasi tersebut untuk mencapai kinerja yang unggul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan segala sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai atau rencana kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi..pada dasarnya..adalah seni dan..ilmu pengetahuan yang menggunakan dan mengembangkan..kekuasaan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi adalah rencana kegiatan yang cermat untuk mencapai tujuan tertentu dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran (Firmanzah, 2008: 259).

Berdasarkan pengertian strategi di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana untuk menetapkan tujuan dan sasaran jangka

panjang serta arah tindakan mengenai kegiatan untuk mencapai keberhasilan. Menang adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai kemenangan. Dengan demikian strategi pemenangan dapat diartikan sebagai suatu rencana yang matang yang disusun dan dilaksanakan oleh seorang calon atau partai politik yang bertujuan untuk mencapai kemenangan atau sasaran yang ditentukan dalam pemilihan kepala daerah. Strategi politik adalah strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Strategi politik sangat penting bagi sebuah partai politik, tanpa strategi politik perubahan jangka panjang sama sekali dapat terwujud (Lerah, 2013: tiga).

Strategi pemenangan kandidat meliputi tiga tahap, yaitu tahap segmentasi pasar politik, tahap penargetan politik dan tahap positioning politik kandidat. Ketiga tahapan strategi ini dimaksudkan agar para caleg dapat hadir menjadi ciri khas masyarakat pemilih kemudian memahami apa yang menjadi aspirasi masyarakat di setiap segmen pemilih dan mewujudkannya dalam bentuk program kerja partai, sehingga bahkan dengan sumber daya yang terbatas seorang kandidat dapat memaksimalkan perolehan suara di daerah pemilihannya. 1) *Segmentasi*, pada dasarnya digunakan untuk mengenal kelompok khalayak yang berguna untuk mencari peluang, meruntuhkan kelompok lawan berdasarkan preferensi, keinginan, selera, gaya hidup, sistem nilai bahkan masalah pribadi. 2) *Targeting*, digunakan untuk memilih satu atau beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran sasaran. Penargetan juga dilakukan untuk memfokuskan kegiatan kampanye dan isu yang dibuat. Sasaran khalayak yang dipilih oleh tim sukses calon adalah individu-individu yang masih dalam posisi tidak memiliki pilihan terhadap salah satu pasangan calon, baik pemilih lama maupun pemilih pemula. 3) *Positioning*, merupakan atribut pembeda yang membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya. Positioning lainnya adalah dalam setiap kampanye politik, tim sukses menata hal-hal sedemikian rupa, mulai dari pakaian yang disesuaikan dengan konteks sosial konstituen

hingga gaya bicara dan materi yang disampaikan untuk meraih simpati dari calon pemilih. (Sugiarto, dkk. 2013:153-154).

Untuk memenangkan pemilihan kepala daerah diperlukan upaya yang harus dilakukan dan strategi yang sistematis dan strategis. Salah satu strategi untuk menarik dukungan pemilih diwujudkan melalui kegiatan kampanye politik. Kampanye politik adalah semua agenda partai atau individu yang berkaitan dengan perkumpulan massa, pawai, orasi dengan presentasi program kerja dan mempengaruhi opini publik, pemasangan atribut partai (misalnya spanduk, poster, spanduk), dan iklan partai melalui media cetak atau elektronik, dengan tujuannya adalah untuk mensosialisasikan program kerja dan mempengaruhi opini publik (Firmanzah, 2010: 217).

Kampanye politik adalah upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dalam ranah kehidupan demokrasi, kampanye politik disebut juga dengan kampanye pemilihan umum (Sayuti, 2014:101). Tujuan kampanye politik juga sangat spesifik tergantung pada jenis pemilihan umum. Kampanye politik menjelang pemilihan presiden bertujuan mempengaruhi calon pemilih untuk memutuskan memilih calon presiden tertentu. Demikian pula dalam kampanye politik pemilihan umum kepala daerah dimaksudkan untuk mempengaruhi calon pemilih agar memutuskan memilih calon kepala daerah tertentu. Menurut Firmanzah dalam bukunya yang berjudul *Political Marketing*, Kampanye politik adalah waktu yang diberikan panitia pemilihan kepada seluruh kontestan, baik partai politik maupun individu, untuk menggambarkan program kerja dan mempengaruhi opini publik serta menggalang publik untuk memilih mereka selama masa kampanye. pemungutan suara (Firmanzah, 2008:271).

Jika kampanye merupakan bagian dari pesta demokrasi, tentu tidak perlu khawatir atau takut, justru seharusnya fase-fase yang ditunggu-tunggu oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Psikologi komunikasi menegaskan bahwa apa yang dapat mempengaruhi massa bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga siapa yang mengatakannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan suara yang besar, selain harus menentukan sosok pasangan calon, juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi politik yang baik dan terstruktur oleh para juru kampanye. Ada dua hal yang harus dimiliki oleh seorang komunikator agar dapat menggerakkan hati massa, yaitu keahlian (*expertise*) dan dapat dipercaya (*trustworthy*). Jika tim kampanye mengambil tema pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan masyarakat, dan tema lainnya, juru kampanye juga harus orang yang dipercaya memiliki keahlian di bidangnya.

Selain para juru kampanye, isi pesan yang disampaikan merupakan bagian yang juga dapat menggugah hati masyarakat. Pesan yang baik adalah pesan yang dapat diinternalisasikan, yaitu gagasan, pemikiran, atau saran yang dapat memenuhi kebutuhan atau dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Semua tindakan, baik yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye, atau pendukung juga merupakan pesan. Oleh karena itu, sebenarnya tahapan kampanye ini digunakan sebagai sarana untuk memikat pemilih, dan menghindari segala tindakan yang dapat menumbuhkan rasa antipati masyarakat. Jangan sia-siakan semua pengorbanan tenaga dan harta rakyat hanya untuk tindakan yang melukai hati nurani rakyat (Hikmat, 2010:218-222).

Kampanye politik pada umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan dan pertemuan publik yang berisi berbagai pidato, pembicaraan tentang penyampaian slogan, atau dalam bentuk penyebaran bahan cetak dan rekaman yang berisi kalimat ajakan, bujukan, gambar atau suara dan simbol. Semua bentuk kampanye pada umumnya mengandung pesan-pesan persuasif yang secara langsung mengajak pendengar, pemirsa atau pembaca untuk menentukan pilihannya terhadap calon atau

parpol tertentu dalam sesi pemilihan umum tertentu. Jenis komunikasi kampanye politik ini pada umumnya dan pada dasarnya dirancang sebagai komunikasi satu arah. Sedangkan untuk sesi debat calon atau debat parpol peserta pemilu yang baru-baru ini dilakukan dan dimediasi oleh stasiun televisi dan disiarkan secara langsung, masih menggunakan jenis komunikasi satu arah yaitu dari media televisi dan atau radio, dan tidak mencakup arah yang berlawanan.

Prihatmoko Joko & Moesafa (Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, 2008 160-161) menjelaskan bahwa strategi politik adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi mencakup berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, dan untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan dalam pemilu. Kemudian untuk mencapai tujuan dalam suatu politik, banyak strategi yang harus dilakukan oleh para kandidat atau pun partai politik. Menurut Peter Schroder dalam (Sahea, dkk 2018) pola dasar strategi yang diperlukan harus kita kenali agar dapat menetapkan pilihan yang tepat. Ada beberapa strategi yang harus dilakukan, yaitu :

1. Strategi Defensif

Strategi defensif akan muncul ke permukaan apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintah yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritas pasar. Selain itu, strategi ini muncul apabila sebuah pasar tidak dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dalam strategi mempertahankan pasar, partai harus mempertahankan pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman mereka sebelumnya pada situasi yang berlangsung.

Partai-partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai-partai yang menerapkan strategi

ofensif. Partai-partai yang menerapkan strategi defensif menjalankan sebuah pemeliharaan secara intensif terhadap beberapa bidang yang ada, serta menawarkan intensif kepada para kader. Data-data tentang keberhasilan yang diperoleh disebarluaskan ke lingkungan sekitar. Investigasi terutama dilakukan dibidang kehumasan. Dalam organisasi, proses semakin dipermudah, rutinitas dikembangkan dan dengan demikian pengeluaran ditekan. Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi defensif adalah partai yang sudah lama berdiri dan sudah memiliki banyak simpatisan diseluruh wilayah.

2. Strategi Ofensif

Strategi ofensif selalu dibutuhkan apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau apabila pihak legislatif ingin mengimpelmentasikan politik yang akan diberikan, perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan. Dalam strategi ini memperluas pasar dan menembus pasar adalah kuncinya. Strategi ini sangat dibutuhkan apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah masa pemilihnya. Dalam hal ini, harus ada banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai tersebut, sehingga nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik dapat berhasil.

Strategi perluasan pasar, bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu harus ada suatu penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Strategi ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran mana saja yang lebih baik dibandingkan dengan penawaran-penawaran lainnya dari partai- partai lainnya. Perluasan pasar ini dapat dicapai dengan isu dan agenda kampanye yang bermutu dan kreatif. Selain itu, penawaran tersebut harus memperhatikan keuntungan-keuntungan yang diperoleh

masyarakat dari partai baru ini. Sedangkan strategi menembus pasar, adalah strategi penggalian potensipotensi yang sudah ada secara optimal.

Hal ini menyangkut pemasaran program-program yang dimiliki secara lebih baik ke masyarakat umum dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu kader partai, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target. Mayoritas partai-partai yang menerapkan strategi ofensif adalah partai yang baru berdiri dan masih sedikit memiliki simpatisan di seluruh wilayah. Partai dan kader harus mengetahui secara mendalam potensipotensi keunggulan dari Partai maupun dari para kader. Keunggulan potensi tersebut bisa digunakan oleh partai maupun kader dalam melakukan kampanye, agar mendapatkan konstituen tetap pada pemilu.

2.2 Tinjauan Partai Politik

2.2.1 Definisi Partai Politik

Menurut Sulistyowati (2009) dalam buku Wibowo (2017:5) partai politik adalah suatu organisasi yang berorientasi kepada pencapaian legitimasi kekuasaan atas pemerintahan melalui proses pemilu. Syaibani mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah melalui pemilu.

Menurut Budiardjo (2003) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir setiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara inkonstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Carl J. Friedrich (Budiarjo 2017:14) mendefinisikan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Partai politik sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai tujuan, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan untuk menciptakan dan menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua negara di dunia ini, dalam artian bahwa umurnya tidak setua umur peradaban manusia. Menurut catatan para ahli pada tahun 1950-an, hampir semua *nation-state* di dunia sudah memiliki partai politik.

Partai politik dalam artian modern adalah salah satu organisasi masa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merubah kebijakan atau aturan dan mendidik para pemimpin serta mengejar penambahan anggota. Menurut Neuman dalam buku (Wibowo, 2017:6) mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha menghimpun kekuatan dan dukungan rakyat dan berusaha menempatkan anggotanya yang berkualitas untuk menjadi wakil partainya dalam menjalankan dan mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai

politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi (Ramlan Surbakti, 1992: 113).

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (Bambang Sunggono, 1992:7). Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:116) menyatakan bahwa “partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun”. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yg bersifat nasional

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998:11).

Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara bottom up maupun top down.

2.2.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi dari partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) terkait fungsi partai politik yang melekat dalam suatu partai politik sebagai berikut.

a. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak berbekas apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, proses tersebut dinamakan (*interest aggregation*). Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang (*interest articulation*).

Jika peran utama ini tidak dilakukan pasti akan terjadi kesimpang siuran isu dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan yang kemudian dimasukkan dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebar luaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dengan demikian terjadi dua arus komunikasi dari atas ke bawah maupun bawah ke atas informasi tersampaikan dengan baik. Peran partai sebagai penghubung sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat, dan dipihak lain juga pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Menurut

Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Namun tak jarang pelaksanaan fungsi komunikasi politik ini menghasilkan informasi yang mengandung isu-isu yang meresahkan masyarakat karena memihak salah satu kelompok (Miriam Budiardjo, 2003:406).

b. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan sebuah proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa karena proses penyampaiannya

tersebut berupa norma-norma dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

A. Rahman H. I. juga mengatakan bahwa fungsi sosialisasi politik partai juga dapat dipandang sebagai suatu upaya menciptakan citra bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Lebih penting lagi apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi untuk mendidik anggota- anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan bersama.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangar dan melatih calon-calon pemimpin.

d. Pengatur Konflik Politik

Pengatur konflik politik merupakan fungsi untuk membantu mengatasi konflik diantara masyarakat atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif nya dapat di tekan seminimal mungkin. Pendapat lain menurut ahli Arend Lijphart (dalam A. Rahman H.I., 2007:103-104) perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Sedangkan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

2.2.3 Peran Partai Politik

Peran partai politik dirumuskan berdasarkan definisi peran dan definisi partai politik, yang kemudian dipermudah penentuannya dalam 18 fungsi-fungsi partai politik. Fungsi yang dilaksanakan partai politik menggambarkan peran yang sedang dilakukan partai politik. Adapun beberapa peran partai politik yang dapat dirumuskan berdasarkan fungsifungsi partai politik adalah sebagai berikut:

a. Komunikator Politik

Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Beberapa

studi mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik.

Sosiolog J.D Halloran, seorang pengamat komunikasi massa, berpendapat bahwa Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan suatu opini publik. Salah satu teori opini publik yang seluruhnya dibangun di sekitar komunikator politik, yaitu teori pelopor mengenai opini publik. Dalam hal ini menegaskan bahwa pemimpin menciptakan opini publik karena mereka berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima.

Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan 19 jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagai berikut: politikus; professional; dan aktivis.

Politikus, Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Daniel Katz (dalam Nimmo, 1989) membedakan politikus ke dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik. Yaitu: politikus ideolog (negarawan); serta politikus partisan. Politikus ideolog adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama/publik. Mereka tidak begitu terpusat perhatiannya kepada

mendesakkan tuntutan seorang langganan atau kelompoknya. Mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara. Sedangkan politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan seorang langganan atau kelompoknya.

Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesia adalah: para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dsb.); para pejabat eksekutif (ketua MPR, Ketua DPR/DPD, Ketua Fraksi, Anggota DPR/DPD, dsb.); para pejabat yudikatif (Ketua/anggota Mahkamah Agung, Ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, jaksa, dsb.).

Profesional, Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa; dan perkembangan serta merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb.) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus.

Aktivis, Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pertama, terdapat jurubicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah; dalam hal ini komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya.

Jurubicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi. namun, ia cukup terlibat baik dalam politik dan semiprofesional dalam komunikasi politik.

b. **Negosiasi Politik**

Menurut Stephen Robbins dalam bukunya “Organizational Behavior”, negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Dalam buku *Teach Yourself Negotiating*, karangan Phil Baguley, dijelaskan juga tentang definisi negosiasi yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan.

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, negosiasi artinya perundingan. Kemudian politik artinya segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu negara. Jadi negosiasi politik yaitu perundingan dua belah pihak yang menyangkut segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan suatu Negara.

c. **Lobby Politik**

Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Menurut A.B Susanto, salah seorang konsultan manajemen, yang dikutip oleh Zainal Abidin Partao (2006), melobi pada dasarnya suatu usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak- pihak yang

menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topic lobi. Lobi merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Lingkup komunikasi yang luas menyebabkan aktivitas lobi juga sama luasnya.

Lobi ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang atau organisasi, dan apa yang dimaksudkan tersebut berada di bawah kontrol atau pengaruh pihak lain (individu maupun lembaga). Pada esensinya lobbying dan negosiasi mempunyai tujuan yang sama yaitu menggunakan tehnik komunikasi untuk mencapai target tertentu. Dibandingkan dengan negosiasi yang merupakan suatu proses resmi atau formal, lobbying merupakan suatu pendekatan informal. Menurut Anwar (1997) definisi yang lebih luas adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak (perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan tercapai.

Menurut Pramono (1997) lobi merupakan suatu pressure group yang mempraktekkan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang dan berupaya mendapatkan relasi yang bermanfaat. Pola ini lebih menekankan bahwa lobby untuk membangun koalisi dengan organisasi- organisasi lain dengan berbagai tujuan dan kepentingan untuk melakukan usaha bersama. Digunakan pula untuk membangun akses guna mengumpulkan informasi dalam isu-isu penting dan melakukan kontak dengan individu yang berpengaruh.

Istilah *lobbying* atau kemudian menjadi “Lobi” dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Perkembangan dewasa ini Lobi-melobi tampaknya tidak terbatas pada kegiatan tersebut namun mulai dirasakan oleh manajer

organisasi untuk menunjang kegiatan manajerialnya baik sebagai lembaga birokrat maupun lembaga usaha khususnya dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

Dalam dunia politik istilah “pelobian” adalah merupakan usaha individu atau kelompok dalam kerangka berpartisipasi politik, untuk menghubungi para pemimpin politik atau pejabat pemerintah dengan tujuan mempengaruhi keputusan pada suatu masalah yang dapat menguntungkan sekelompok orang.

d. Mediator Politik

Menurut Syahrizal Abbas definisi mediasi dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. ‘Berada ditengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi menurut Valerine JL

Kriekhoff sebagaimana disampaikan oleh Zainuddin Fajari “salah satu bentuk negosiasi antara dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistik atau salah satu cara menyelesaikan masalah diluar pengadilan.” Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah “suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mnegupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak

bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

2.3 Tinjauan Pemilihan Umum

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*” mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Permana dalam Pradhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang

sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang representatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru.

Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto. Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

- a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
- b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat

- c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (*governabilitas*).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Saragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi electoral laws atau hukum dasar pemilu dan electoral process atau proses pemilu.

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami penambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar

dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.

Huntington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Dani (2006: 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002: 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UndangUndang Dasar 1945

2.3.2 Fungsi Pemilihan Umum

Syamsuddin Harris (1997) mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:

- a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.

2.3.3 Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur

dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber 15 dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, asas pemilihan umum meliputi :

- a. Umum Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.
- b. Bebas Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hatinuraninya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.
- c. Rahasia Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.
- d. Jujur Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksana dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Adil Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

Menurut Rahman (2002: 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu :

- a. Penyuaaraan (*balloting*) Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.

- b. Daerah pemilihan umum (*electoral district*). Artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
- c. Formula pemilihan. Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan”.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Darmastuti dan Maryanah (2004: 48) menjelaskan ada beberapa prinsip-prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu :

- a. Keadilan Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.
- b. Kejujuran Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (*legitimate*) karena tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, maupun kelompok independen) dan para pemilih.
- c. Umum Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada

masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya.

- d. Bebas Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.
- e. Kerahasiaan Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.
- f. Langsung Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi (Syafiie, 2005: 136). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (*single-member constituency*) dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (*multi-member constituency*). (Kristiadi, 2008: 461)

Sistem distrik (*single-member constituency*) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang 18 sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama

dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu, sudah barang tentu akan banyak suara yang terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (*personen stelse*), data distrik biasanya memiliki satu wakil (Syafie, 2005: 136-137).

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Kristiadi (2006: 466) adalah sebagai berikut :

- a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.
- c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
- d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
- e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
- f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

2.4 Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah Oleh Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan atau untuk menjawab suatu permasalahan dengan menggunakan kriteria-kriteria ilmiah. Dengan demikian metode penelitian mencakup studi tentang cara-cara melakukan sebuah penelitian (Firdaus,2012:10). Penelitian terhadap Strategi Kemenangan Partai NasDem Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara menggunakan tipe Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong,2014:5).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Eko,2015:8). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Menurut Arikunto (2010:5) metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Alasan Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah dalam menganalisis sebuah fenomena sangat membutuhkan dukungan data yang diperoleh dengan tehnik wawancara. Selanjutnya yaitu pengkajian mengenai konflik yang melibatkan eksekutif dan legislatif ini membutuhkan data lapangan yang sifatnya tidak statistik atau diperhitungkan dalam sistem angka. Dengan metode Penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan data yang sebenarnya mengenai Strategi Kemenangan Partai NasDem Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas (Burhan, 2012:41). Penelitian ialah fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana Strategi Kemenangan Partai NasDem Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara.

3.3 Penentuan Informan

Memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif *fenomenologis*, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi

yang ditemui dilapangan (Anis dan Kandung, 2014:9). Berikut adalah data informan dalam penelitian ini :

Tabel 5. Triangulasi Informan

No.	Nama Informan	Jabatan Dalam Instansi
1	Genius Akbar, S.H., M.H., C.M., CLA	Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Utara Fraksi NasDem
2	Muhammad Yusrizal, S.T	Ketua Bappilu Partai Gerindra
3	H. Imam Syuhada	Ketua DPD Partai NasDem Lampung Utara
4	Hery Yanto	Ketua Bappilu Partai NaDem Lampung Utara
5	Darmawan Purba, S.IP., M.IP	Pengamat Politik Universitas Lampung
6	M. Yusuf Akbary	Pemuda Lampung Utara
7	Raden Mas Putra Mega, S.E	Pengamat Politik Lokal

Sumber :Diolah oleh Peneliti

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran si penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Menurut Ridwan (2008:69), sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang di peroleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosur dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta

diperoleh dari proses belajar mengajar dan beberapa dokumen berupa data penunjang peran dari fraksi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses Penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian (Sugiyoni, 2012:224). Untuk mengumpulkan data dengan akurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan lain lain (Moleong,2017:186).

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas. Dalam konteks ini berbagai jawaban diutarakan. Jadi, wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (*situated under standings*) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang Peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan, dan gender (Norman dan Yvonna, 2009:495).

Wawancara juga diartikan sebagai bentuk komunikasi langsung antara Peneliti dan responden. Komunikasi terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola Media yang melengkapi kata-kata verbal (Gulo,2002:119). Jadi wawancara

diartikan sebagai proses interaksi dengan tujuan memperoleh informasi mengenai orang, organisasi, fenomena, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan yang di wawancarai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219).

Alasan peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang akurat dalam penelitian. Dokumentasi juga menjadi bahan acuan peneliti untuk melihat data-data berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang belum begitu lama.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi menjadi observasi partisipan (*participant observation*), partisipasi non-partisipan (*non-participant observation*) dan observasi terhadap objek (Widi, 2010:237-238).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas kelompok yang diteliti sebab menyusun strategi dan rencana koalisi suatu partai politik dalam menghadapi pemilihan umum sifatnya rahasia dan tertutup. Teknik observasi digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat

dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun,2008:240) terdiri dari:

1. Editing

Editing adalah kegiatan dalam Penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, Peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penelitian. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penelitian juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2017:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan nya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Di pihak lain, analisis data kualitatif (Seiddel,1998), prosesnya berjalan sebagai berikut:

Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber data nya tetap dapat di telusuri, Mengumpulkan, memilah milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan di interpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dan Huberman, 1992:17), yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final nya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuang data yang tidak sesuai dengan fokus Penelitian.

2. *Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis dilapangan. Misalnya, data yang mendukung Penelitian dari hasil yang ada dilapangan yang didapat dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Catatan-catatan penting dilapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan Peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan Penelitian. Kegiatan Peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan Penelitian yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan teori yang Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan Penelitian ini. Kemudian Peneliti akan

menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus Penelitian. Data di analisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.8 Teknik Validasi/Keabsahan Data

Agar dapat menentukan keabsahan data dalam Penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana di kemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan Penelitian yaitu salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Denzin (dalam Patton, 2015:331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam Penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331) sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan nya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan peneliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian nya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggung jawaban.

3. Kebergantungan (*Dependity*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam Penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam Penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengandisepakati hasil Penelitian oleh banyak orang maka hasil Penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

Memeriksa kebenaran data menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai macam sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dilakukan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Partai NasDem

Pada awal pembentukannya NasDem merupakan organisasi masyarakat yang didirikan pada tahun 2009, yang bertujuan untuk mewadahi idealisme dari para tokoh-tokoh Indonesia dan meluruskan cita-cita reformasi yang dianggap sudah tidak lagi dijalankan. Tahun 2010 Ormas NasDem sudah mulai terbentuk di seluruh daerah di Indonesia di bawah kepemimpinan Patrice Rio Capella dan hal ini yang menjadi awal pembentukan Partai Nasdem yang sebelumnya merupakan organisasi masyarakat.

Deklarasi Partai NasDem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Deklarasi Partai NasDem hanyalah salah satu tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini, guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Kongres I Partai NasDem yang digelar pada tanggal 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem, berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini, satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar

pukul 23.00 WIB, seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun. (Dokumentasi DPW Partai NasDem Provinsi Lampung).

Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai, amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Bukan cuma itu, kongres juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014. (Dokumentasi DPW Partai NasDem Provinsi Lampung).

Resmi menjadi partai, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu, bersama dengan 46 parpol yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014, Partai NasDem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU satu di antaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berniat ikut pemilu legislatif tahun 2014, KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012, akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi dan KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 18 partai gugur.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi untuk pemilu legislatif tahun 2014 adalah Partai NasDem. Dari 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, KPU menilai Partai NasDem lolos verifikasi administrasi dengan kualifikasi

terbaik. Parpol yang lolos verifikasi administrasi berhak mengikuti verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung KPU ke lapangan untuk mengecek infrastruktur parpol di setiap daerah disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi. Senin 7 Januari 2013 KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai NasDem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain:

1. Memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekrtaris Jenderal;
2. Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan;
3. Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014.

4.1.1 Visi dan Misi Partai Nasdem

Visi

Mengembalikan tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yakni Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Misi

Menggalang kesadaran dan kekuatan masyarakat untuk melakukan Gerakan Perubahan melalui Restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia adalah gerakan memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita Proklamasi 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Visi dan misi di atas disusun berdasarkan manifesto Partai NasDem saat pendeklarasian partai ini pada 26 Juli 2011. Isi lengkap Manifesto Partai NasDem adalah sebagai berikut:

"Negara diadakan untuk menjalankan mandat yang tertuang dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945". Mandat untuk menjadikan manusia Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, merdeka sebagai negara, merdeka sebagai rakyat.

Merdeka yang kami maksud berarti kebutuhan rakyat terpenuhi, tidak hanya berhenti sebagai jargon-jargon politik, indah didengar, namun tidak pernah mewujudkan. Di sinilah Negara Indonesia yang merdeka, memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan rakyatnya, termasuk melindungi jika hak-hak itu dilanggar.

Kita patut berbangga dan bersyukur karena reformasi telah mengeluarkan kita dari kubangan kediktatoran. Namun pada saat yang sama, reformasi juga tidak menawarkan arah yang jelas ke mana bangsa ini akan menuju. Demokrasi terjebak dalam prosedur-prosedur yang tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat.

Demokrasi berjalan tanpa bimbingan. Ideologi politik tanpa program politik yang konsisten dan pada akhirnya menjauhkan negara dari mandat konstitusionalnya. Kami menolak demokrasi yang sekadar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. NasDem menolak demokrasi yang hanya melahirkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. NasDem menolak demokrasi tanpa orientasi kepada publik. NasDem menolak negara yang meninggalkan perannya dalam pemenuhan hak warga negara.

NasDem mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang yang menjadi tempat persandingan keberagaman dan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpenggil untuk merebut satu masa depan yang gemilang dengan keringat dan tangan sendiri. Kami berdiri atas nama gagasan sosial demokrasi yang mengedepankan kehadiran negara dalam

pemenuhan hak- hak warga negara. Kami berdiri untuk membangun politik warga negara, keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem berdiri untuk merestorasi cita-cita Republik Indonesia. Kami mengusung mandat konstitusi untuk membangun satu negara kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Partai NasDem lahir sebagai keharusan sejarah, NasDem lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dan lahir sebagai jawaban atas kekosongan politik gagasan pascareformasi. NasDem berdiri tegak dengan semangat kebangsaan yang kuat, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat melalui Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Partai NasDem adalah perwujudan dari nasionalisme kebangsaan, kedaulatan nasional yang bertumpu pada masyarakat yang sejahtera, kekuatan yang demokratik seluruh komponen bangsa, kemandirian ekonomi, dan negara bangsa yang memiliki martabat dalam pergaulan internasional. Kami persembahkan Partai NasDem untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk bangsa dan tanah air yang kami cintai hingga akhir hayat.

4.1.2 Anggaran Dasar Partai Nasdem

PEMBUKAAN MANIFESTO PARTAI NASDEM

Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai Negara Demokrasi. Tetapi, kami menolak demokrasi yang hanya sekadar merumitkan tata cara pemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas

sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani.

Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri. Maka pada hari ini kami berketetapan hati menggalang sebuah gerakan bernama:

NASIONAL DEMOKRAT: RESTORASI INDONESIA

Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Nasional Demokrat tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan gerakan perubahan yang titik-titik sumbunya terpencah di seluruh penjuru Indonesia.

Untuk melaksanakan gerakan perubahan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang demokratis, mensejahterakan, berkeadilan dan bersatu dalam kebhinnekaan, dibutuhkan kesadaran kebangsaan yang diikuti sikap kenegarawanan dalam derap langkah kerja untuk keunggulan bangsa, terdapat keharusan bertransformasi sebagai partai politik yang konsisten di jalur Restorasi dan berpegang pada Manifesto Partai NasDem, maka dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN PARTAI

Pasal 1

(1) Partai ini bernama Partai NasDem.

(2) Partai NasDem berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II PENDIRIAN PARTAI

Pasal 2

(1) Partai NasDem didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 1 Februari Tahun 2011 di Jakarta.

(2) Partai NasDem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli Tahun 2011, didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 Juli Tahun 2011.

(3) Partai NasDem ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum pada tanggal 11 November Tahun 2011 dan selanjutnya ditetapkan sebagai tanggal peringatan Hari Ulang Tahun Partai NasDem.

BAB III ASAS DAN CIRI PARTAI

Pasal 3

(1) Partai NasDem berasaskan Pancasila.

(2) Partai NasDem mempunyai ciri Partai yang disebut Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

BAB IV VISI & MISI

Pasal 4

Visi Partai NasDem adalah Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya.

Pasal 5

Misi Partai NasDem adalah:

1. Membangun politik demokratis berkeadilan, berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan. Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju

- efisiensi sistem pemilihan umum. Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai kontrak politik kebangsaan dan menegakkan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yakni supremasi hukum, persamaan kedudukan di depan hukum dan proses hukum yang berkeadilan;
2. Menciptakan demokrasi ekonomi dengan terciptanya partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi;
 3. ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi tingkat lokal;
 4. Menjadikan gotong royong sebagai karakter bangsa untuk menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak warga negara memperoleh pendidikan, sehingga menciptakan solidaritas dan soliditas nasional rakyat Indonesia untuk merasakan kebanggaan sebagai bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian. Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

4.2 Gambaran Umum Lampung Utara

4.2.1 Kondisi Geografis

Berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2006, wilayah Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2006 dimekarkan menjadi 23 kecamatan dan 247 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 272.563 Ha yang terdiri dari kecamatan:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Bukit Kemuning | 13. Blambangan Pagar |
| 2. Abung Tinggi | 14. Abung Timur |
| 3. Tanjung Raja | 15. Abung Surakarta |
| 4. Abung Barat | 16. Sungkai Selatan |
| 5. Abung Tengah | 17. Muara Sungkai |
| 6. Abung Kunang | 18. Bunga Mayang |
| 7. Abung Pekurun | 19. Sungkai Barat |
| 8. Kotabumi | 20. Sungkai Jaya |
| 9. Kotabumi Utara | 21. Sungkai Utara |
| 10. Kotabumi Selatan | 22. Hulu Sungkai |
| 11. Abung Selatan | 23. Sungkai Tengah |
| 12. Abung Semuli | |

Wilayah Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah agraris dengan mata pencaharian pokok penduduknya di sektor pertanian.

4.2.2 Topografi

Secara topografi, sebelah barat merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 450-1500 m dari permukaan laut, dan pada bagian timur merupakan dataran rendah yang tertutup awan vulkanis. Ada tiga gunung yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara, yaitu Gunung Haji, Gunung Ulu Sabuk, dan Gunung Tangkit Teb. Sungai yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut: Way Rarem, Way Galing, Way Kulur, Way Sabuk, Way Kelamas, Way Rendah, Way Talang Mas, Way Melungun, Way Kelanga, Way Sungkai Hulu, Way Buluh, Way Buyut, Way Hanakau, Way Sungko Hilir.

4.2.3 Iklim

Rata-rata curah hujan pada tahun 2011 lebih rendah (153,5 mm) dibandingkan dengan tahun 2010 (244,1 mm). Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret mencapai 447,0 mm dan terendah pada bulan Agustus, 0 mm dan hari hujan hanya 1 hari. Pada Tahun 2011 Suhu rata-rata

maksimum berkisar antara 32,1°C sampai 35,5°C. Sedangkan suhu udara rata-rata minimum berkisar antara 21,4°C sampai 24,0°C.

4.2.4 Perekonomian dan Mata Pencaharian

Perekonomian Kabupaten Lampung Utara dalam periode 2020 hingga 2025 menunjukkan perubahan struktur yang signifikan, ditandai dengan menurunnya dominasi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri dan jasa. Pada tahun 2020, sektor pertanian menyumbang sebesar 47,3% terhadap struktur ekonomi, namun menurun secara bertahap menjadi 39,7% pada tahun 2025. Sebaliknya, sektor industri meningkat dari 16,2% menjadi 21,7%, dan sektor jasa juga tumbuh dari 36,5% menjadi 38,6%. Perubahan ini mencerminkan adanya pergeseran mata pencaharian penduduk dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, yang dipengaruhi oleh perkembangan urbanisasi, industrialisasi, dan peningkatan akses terhadap pendidikan serta teknologi.

Seiring dengan transformasi ini, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,8% pada tahun 2020 menjadi 4,7% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang bisa dikaitkan dengan tumbuhnya sektor industri dan jasa yang lebih padat karya. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian terhadap penguatan sektor pertanian agar tetap berdaya saing serta menjaga ketahanan pangan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasi menjadi kunci penting dalam mengoptimalkan transisi ekonomi ini agar memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan.

4.2.5 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara dalam periode 2020 hingga 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 636.000 jiwa dan terus meningkat menjadi 670.000 jiwa pada tahun 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan

dinamika demografis yang perlu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan layanan dasar. Dalam hal ketenagakerjaan, angkatan kerja juga mengalami peningkatan dari 345.000 orang pada tahun 2020 menjadi 370.000 orang pada tahun 2025.

Hal ini menandakan adanya penambahan jumlah penduduk usia produktif, yang jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru, dapat menimbulkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja. Meski demikian, angka pengangguran menunjukkan tren penurunan, dari 5,8% pada tahun 2020 menjadi 4,7% di tahun 2025, mengindikasikan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri dan jasa yang mengalami pertumbuhan. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan momentum ini dengan memperluas program pelatihan vokasional, pengembangan wirausaha lokal, dan peningkatan investasi pada sektor-sektor padat karya agar bonus demografi ini dapat menjadi penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Secara umum, strategi pemenangan Partai NasDem dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Lampung Utara menunjukkan adanya upaya yang terstruktur, sistematis, dan menyentuh akar persoalan masyarakat. Strategi tersebut dijalankan dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, memadukan metode tradisional dengan instrumen digital, serta menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pembangunan basis kekuatan politik. Hal ini menjadi indikasi bahwa Partai NasDem tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan kekuatan politik jangka panjang yang berbasis pada kedekatan dengan masyarakat dan penyelesaian persoalan riil di tingkat lokal.

1. Strategi Defensif dalam pemenangan yaitu untuk mencapai peningkatan perolehan kursi legislatif melalui proses politik yang demokratis, tanpa mahar, dan berbasis kerja nyata. Partai NasDem berfokus pada menjaga dan mempertahankan basis pemilih yang telah ada, serta melindungi hasil yang telah diperoleh pada Pemilu sebelumnya. NasDem memperkuat kampanye berbasis lokal serta menjaga konsistensi dan stabilitas partai dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemilih di berbagai tingkat.
2. Strategi Ofensif pemenangan dalam rangka menunjang pencapaian memanfaatkan kekuatan calon legislatif yang memiliki daya tarik tinggi serta mengincar basis pemilih baru. NasDem memfokuskan upaya untuk menjangkau pemilih muda, kelompok marginal, dan daerah yang kurang terjangkau oleh pesaing lain. Partai ini juga

memanfaatkan media sosial dan kampanye daring untuk menjangkau kelompok pemilih yang lebih luas dan beragam.

3. Strategi Pencitraan pemenangan yang digunakan oleh Partai NasDem berfokus pada membangun citra positif yang kuat, baik dari partai maupun calon legislatifnya. Pencitraan yang baik dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai. NasDem memanfaatkan berbagai kampanye pemasaran dan komunikasi yang dirancang untuk memperkenalkan ideologi partai yang mengedepankan perubahan, serta mendekatkan calon legislatif kepada masyarakat melalui aktivitas sosial, interaksi langsung, dan promosi di media sosial.
4. Strategi Ketokohan dan Kelembagaan pemenangan yang digunakan berfokus pada pemilihan calon legislatif yang memiliki ketokohan dan pengaruh kuat di kalangan masyarakat. Sementara itu, strategi kelembagaan memastikan struktur organisasi partai di tingkat daerah berjalan dengan efektif untuk mendukung kampanye secara maksimal. NasDem memilih calon legislatif yang sudah memiliki pengaruh atau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan aspirasi rakyat. Selain itu, struktur kelembagaan yang solid di Lampung Utara memungkinkan koordinasi yang efisien, sehingga kampanye dapat dijalankan dengan sistematis dan terorganisir dengan baik.

6.2 Saran

1. Optimalisasi Segmentasi Pemilih dan Penguatan Basis Konstituen

Partai NasDem disarankan untuk melakukan pemetaan pemilih secara lebih terperinci, tidak hanya berdasarkan usia dan wilayah, tetapi juga berdasarkan latar belakang profesi, afiliasi komunitas, serta isu-isu yang menjadi perhatian khusus bagi kelompok tertentu. Penguatan basis konstituen dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan emosional dan interaksi berkelanjutan dengan komunitas-komunitas lokal, baik melalui

kegiatan sosial, diskusi publik, maupun pelibatan langsung masyarakat dalam agenda partai.

2. Inovasi Sarana Kampanye Digital dan Keterlibatan Anak Muda

Dengan semakin dominannya pemilih milenial dan generasi Z, Partai NasDem perlu terus melakukan inovasi dalam penggunaan media sosial dan teknologi digital sebagai sarana kampanye politik. Konten kampanye harus dikemas secara menarik, edukatif, dan relevan dengan kebutuhan serta gaya komunikasi generasi muda. Selain itu, partai perlu membuka ruang lebih luas bagi anak muda untuk berpartisipasi dalam penyusunan strategi dan pelaksanaan kampanye secara langsung.

3. Penguatan Kelembagaan Internal dan Kaderisasi Berbasis Kompetensi

Sarana utama dalam menjalankan strategi pemenangan adalah struktur dan kader partai itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar Partai NasDem memperkuat kelembagaan internal melalui pelatihan rutin, pendidikan politik, dan kaderisasi yang berkelanjutan. Proses kaderisasi hendaknya tidak hanya berfokus pada loyalitas, tetapi juga pada kapasitas intelektual, integritas, dan kemampuan komunikasi politik.

4. Penyelarasan Strategi Jangka Pendek dan Panjang Keberhasilan dalam pemilu tidak hanya ditentukan oleh strategi jangka pendek menjelang hari pemungutan suara, tetapi juga oleh konsistensi gerakan politik jangka panjang. Oleh karena itu, Partai NasDem perlu merumuskan peta jalan strategis yang berkelanjutan dan terintegrasi antara agenda elektoral dan agenda pembangunan sosial. Strategi jangka panjang ini hendaknya dirancang untuk memperkuat posisi partai sebagai representasi kepentingan rakyat dalam sistem demokrasi lokal.

5. Perluasan Kerja Sama dengan Akademisi dan Lembaga Pemantau Politik

Dalam rangka penyusunan strategi politik yang berbasis data dan analisis mendalam, disarankan agar Partai NasDem membangun kerja sama yang lebih intensif dengan kalangan akademisi, lembaga survei, dan pengamat

politik. Hal ini penting untuk memperoleh masukan yang objektif, memperbaiki strategi yang kurang efektif, serta mengevaluasi capaian dan tantangan dalam setiap momentum pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu

Ali Moertopo, 1974. *Strategi Politik Nasional*. CSIS. Jakarta

Anis, Kandung. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Arend Liphart. 1995. *Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta

Arifin A, 2006. *Pencitraan Dalam Politik (Strategi Pemenangan PEMILU Dalam Perspektif Komunikasi Politik)*. Jakarta: Pustaka Indonesia

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Abdul Hakim, Redi Panuju. *Strategi Komunikasi Politik Dpc Pdi Perjuangan Surabaya Pada Pemilu Legislatif 2019*. (Jurnal. Universitas dr Soetomo Surabaya. 2019)

Agus, M Hardjaja. 2002. *Stres Tanpa Distres: Seni Mengolah Stress*. Yogyakarta: Kanisius

Ariel Kristianto Pura. *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmehera Barat Tahun 2019*. (Jurnal. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT. 2019)

Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. PT Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. 528 halaman.

Arifin, Anwar. 2014. *Perspektif Ilmu Politik*. Pustaka Indonesia: Jakarta. 222 halaman.

Anwar. (1997). *Lobbying dan Negosiasi Politik*.

Assauri, S. (2013). *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Budiarjo Miriam, 2003, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Burhan Bungin. 2012. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chandler, Jr. 1962. *Strategy and Structure: Chapters in The Hostory of The Industrial Enterprise*. Cambridge Mass: MIT Press
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 560 hlm.
- Caton, Mathias. 2007. *Effective Party Assistance: Stronger Parties for Better Democracy*. Internastional IDEA: Swedes. 319 halaman.
- Cipto, Bambang. 2000. *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta. 177 halaman.
- Djojosoekarto, Agung and Utama Sandjaya (edisi). 2008. *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*. Partnership for Governance Reform dan Strategic Transformation Institute.
- Dani. (2006). *Pemilu dan Demokrasi*.
- Darmastuti, R., & Maryanah. (2004). *Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum*.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Paractice in Europe and Americ*. Waltham, Mass. Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gie, The Liang. 1978. *Ilmu Politik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. 129 halaman.
- Glaser, Barney G dan Anslem L Strauss. 2006. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. A Division of Transaction Publishers: United Stated of America, London. 271 halaman.

Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. PT Grafindo: Jakarta. 272 halaman.

H.R. Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Citra Aditya Bakti. Jakarta

Haris, Syamsuddin. 1997. *Pemilihan Umum di Indonesia : Telaah atas Struktur, Proses dan Fungsi*. Jakarta: PPW-LIPI

Hikmat, M. M. (2010). *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Jenifer Pesak, Daysi Posumah, Trilke Tulung. *Strategi Pemenangan Partai Solidaritas Indonesia Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Manado Tahun 2019*. (Jurnal. FISIP UNSRAT 2019)

John A. Byrne, D, (2012. *Social Psychology: Thirteenth Edition*. United States: Pearson Education. Inc

Milles and Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*

Mintzberg, H. (2007). *Tracking Strategies: Toward a General Theory of Strategy Formation*. Oxford: Oxford University Press.

Nimmo, D. (2005). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sahea Rifaldi, dkk. 2018. *Analisis Strategi Politik Sri Wahyumi Maria Manalip-Petrus Simon Tuange dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2023*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 1, No 1, Tahun 2018.

Rangkuti, F. (2009). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sayuti, M. (2014). *Komunikasi Politik dalam Dinamika Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Sunggono, B. (1992). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafii, I. K. (2005). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Umar, H. (2002). *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.